



Kementerian PPN/
Bappenas



POLICY RECOMMENDATION

Pendanaan Ekonomi Biru Dalam Rangka Implementasi Program Prioritas Ekonomi Biru Astacita

Dipersiapkan oleh:
Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF)



Latar Belakang

Indonesia dengan wilayah pesisir dan laut serta sumber daya di dalamnya selama ini telah menjadi bagian utama dari kehidupan masyarakatnya, di mana diperkirakan mendukung kegiatan ekonomi Indonesia senilai lebih dari USD 280 miliar setiap tahunnya. Selain berkontribusi terhadap ketahanan pangan secara nasional, potensi kelautan dan perikanan juga sangat erat kaitannya dengan ekonomi masyarakat pesisir yang memiliki ketergantungan yang tinggi pada aktivitas penangkapan ikan.

Kondisi ekosistem pesisir yang sehat menjadi perhatian terbesar agar stok ikan terjamin dan akan berkaitan dengan kemiskinan dan kerentanan masyarakat pesisir. Selain meningkatkan proporsi luasan kawasan konservasi, elemen penting lain dari keberadaan kawasan konservasi adalah meningkatkan kemanfaatannya bagi lingkungan dan kehidupan sosial ekonomi Masyarakat

Indonesia memiliki tiga transformasi menuju Indonesia Emas Tahun 2045 yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025 – 2045 yaitu:



Transformasi Sosial



Transformasi Ekonomi



Transformasi Tata Kelola.

Dalam rangka mendukung transformasi ekonomi, ekonomi biru dikembangkan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru Indonesia.

Peta jalan ekonomi biru sampai dengan tahun 2045 mencakup aksi – aksi strategis untuk meningkatkan sektor-sektor yang sudah cukup mapan, dengan fokus pada empat sub sektor,



Perikanan tangkap dan akuakultur



Industri berbasis kelautan (termasuk industri pengolahan makanan berbasis kelautan, industri pembuatan kapal, dan industri kimia dan farmasi, termasuk garam);



Perdagangan, transportasi, dan logistik maritim



Pariwisata

Astacita 2 memiliki program kerja

Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru

Sektor pendanaan biru diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap transformasi perekonomian Indonesia melalui pengembangan ekonomi biru yang berkelanjutan. Pendanaan biru Astacita yang dikelompokkan ke dalam klaster-klaster berikut:



Implementasi dari ketujuh Klaster tersebut membutuhkan pendanaan biru yang cukup besar. Agar pendanaan biru dapat tersalurkan dan berkembang dengan berkelanjutan dibutuhkan tata Kelola dan peningkatan sumber daya manusia untuk dapat mengelolanya.

Saat ini tata Kelola pendanaan biru dan kapasitas sumber daya manusianya masih harus dikembangkan lebih besar dan menyeluruh, untuk itu dibutuhkan suatu kajian kebijakan dalam bentuk Policy Brief untuk mengungkapkan tantangan/hambatan dan rekomendasi agar tata Kelola pendanaan biru dapat terwujud berikut

dengan peningkatan kapasitas sumber dayanya.

FGD yang diadakan pada 15 Juli 2024 melibatkan para stakeholder utama, termasuk berbagai kementerian dan lembaga, untuk mengidentifikasi tantangan dan hambatan implementasi dan koordinasi Program Prioritas Ekonomi Biru Astacita.

Diskusi ini sangat penting dalam konteks Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, khususnya dalam pemanfaatan ekonomi biru secara berkelanjutan.

Tantangan dan Hambatan

Klaster 2

Pengelolaan ekosistem, kawasan konservasi perairan dan pesisir

Hambatan:

1. Terdapat kesenjangan dalam koordinasi antarkementerian/lembaga yang berakibat pada implementasi kebijakan ekonomi biru yang tidak konsisten, khususnya pada tingkat daerah.
2. Baik anggaran maupun sumber daya manusia seringkali tidak mencukupi, hal ini menghambat pengembangan dan pelaksanaan program ekonomi biru secara efektif. Contohnya pada UPTD Kawasan Konservasi, jumlah staf maupun anggaran untuk implementasi program tidak dapat secara penuh melakukan peran dan tugasnya secara maksimal karena keterbatasan sumber daya ini.

Klaster 2

Pengelolaan ekosistem, kawasan konservasi perairan dan pesisir

3. Belum terintegrasi dalam banyak program pemerintah yang bertujuan mendukung aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, meskipun ini adalah elemen penting dalam menjaga keberlanjutan kawasan konservasi.
4. Ada kekurangan dalam pendanaan yang efektif dan efisien, termasuk kejelasan penggunaan dana, khususnya dari pendanaan dan potensi penggunaan Blended Finance.
5. Kurangnya koordinasi dan komunikasi antar-lembaga sering mengakibatkan duplikasi usaha dan penggunaan sumber daya yang tidak efisien.

Tantangan:

1. Tantangan dalam mengimplementasikan kebijakan dan program yang konsisten antar daerah, yang menyulitkan pembentukan kebijakan ekonomi biru yang komprehensif di tingkat nasional.
2. Kendala dalam pengembangan kapasitas dan pemahaman terhadap ekonomi biru di tingkat daerah, serta perluasan kawasan konservasi yang membutuhkan peningkatan pendanaan.

Klaster 3,4,5,6

Hambatan:

1. Rendahnya produktivitas, nilai tambah, daya saing ekonomi biru yang tercermin pada rendahnya kontribusi PDB Maritim terhadap PDB Nasional.
2. Rendahnya kualitas, keterjangkauan, dan keamanan pangan akuatik/pangan biru.
3. Kurangnya pendanaan dan tata kelola pada sektor-sektor penghasil barang, penghasil jasa, dan upaya konservasi di kawasan perairan dan pesisir.

Klaster 3

Industrialisasi berbasis SDA perikanan dan kelautan yg modern terintegrasi dan berkelanjutan

Tantangan dan Hambatan:

PERIKANAN TANGKAP

1. Penimbunan (overstock) dan penangkapan ikan berlebihan (overfishing);
2. Praktik-praktik yang tidak berkelanjutan, termasuk alih fungsi lahan bakau dan padang lamun menjadi lahan budidaya;
3. Kurangnya tata kelola pengelolaan sumber daya kelautan dalam menangani IUUF;
4. Produktivitas yang stagnan karena masalah kesejahteraan dan kondisi kerja
5. Pencemaran dan degradasi ekosistem
6. Belum optimal hilirisasi produk perikanan tangkap dan akuakultur yang didukung pengembangan rantai pasok
7. Belum optimalnya pengelolaan sumber daya ikan secara berkelanjutan dan adanya degradasi Sumber Daya Ikan (SDI) akibat eksploitasi melebihi batas kemampuan ikan untuk melakukan regenerasi;
8. Tingkat produktivitas kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang masih perlu ditingkatkan;
9. Tnfrastruktur dan konektivitas pelabuhan perikanan serta sarana dan prasara lainnya yang belum memadai;
10. Belum optimalnya akses nelayan terhadap faktor produksi termasuk permodalan serta sistem perlindungan yang harus terus dikembangkan.

Kebijakan Perikanan Tangkap:

1. Menerapkan perikanan tangkap berbasis kuota, pendekatan ekosistem, dan strategi penangkapan yang lebih baik;
2. Meningkatkan praktik akuakultur menjadi lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan, termasuk perbaikan regulasi zonasi akuakultur dan menerapkan solusi teknologi yang berkelanjutan, standar dan skema sertifikasi yang kuat, serta menyediakan skema insentif untuk praktik-praktik yang berkelanjutan;
3. Mendorong hilirisasi produk perikanan tangkap dan akuakultur yang didukung pengembangan rantai pasok yang berketahanan yang melibatkan kemitraan antara nelayan skala kecil dengan industri menengah dan besar, dan penerapan solusi teknologi yang inovatif dan berkelanjutan;
4. Menyediakan pelatihan, termasuk praktik-praktik yang baik dalam penanganan ikan dan akuakultur dalam rangka meningkatkan kualitas produk perikanan, serta pemantauan untuk mengurangi praktik IUUF;

5. meningkatkan produktivitas yang didukung oleh skema perlindungan sosial bagi nelayan dan pekerja maritim, dan akses yang lebih baik terhadap pembiayaan bagi pelaku skala kecil;
6. meningkatkan teknologi, penelitian, dan data perikanan tangkap dan akuakultur; dan
7. mendorong kebijakan dan program yang efektif terkait dengan penerapan manajemen pengendalian sampah laut dan kehilangan makanan untuk menjaga ekosistem laut yang sehat demi perikanan yang berkelanjutan.

Tantangan dan Hambatan:

PERIKANAN BUDIDAYA / AKUAKULTUR

Internal

1. Terbatasnya ketersediaan benih dan induk yang bermutu dan berkualitas
2. Harga pakan masih dikontrol oleh pasar karena ketersediaan pakan yang berkualitas dan bermutu dengan harga terjangkau masih terbatas
3. Potensi bahan baku pakan lokal untuk pembuatan pakan ikan di masyarakat (kelompok GERPARI) belum optimal dimanfaatkan sehingga masih bergantung pada impor
4. Persyaratan perizinan yang sangat kompleks, kelembagaan pembudi daya ikan masih belum bankable
5. Keterbatasan akses permodalan untuk usaha perikanan budidaya
6. Keterbatasan pengetahuan SDM pelaku usaha perikanan budidaya
7. Manajemen pengelolaan lingkungan dan penyakit ikan yang belum optimal
8. Implementasi cara berBudi Daya ikan yang baik (pembesaran, pembenihan dan pembuatan pakan mandiri) belum optimal diimplementasikan oleh pelaku usaha perikanan Budi Daya
9. Kondisi infrastruktur yang belum memadai dan terbatas untuk mendukung usaha perikanan budidaya yaitu antara lain balai benih ikan, saluran irigasi, listrik, jalan produksi, laboratorium kesehatan ikan, laboratorium kultur jaringan

Eksternal

1. Tidak adanya kepastian ruang untuk usaha perikanan Budi Daya,
2. Adanya asimetrik regulasi dan perizinan inter dan intra sektoral yang menghambat pengembangan usaha perikanan budidaya
3. Adanya perubahan iklim dan penurunan kualitas lingkungan
4. Belum adanya harmonisasi kebijakan, program dan anggaran antara pusat dan daerah serta inter dan intra sektoral

Masalah perubahan iklim

Aktivitas pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan, baik yang berada di daratan, wilayah pesisir, maupun laut, tidak dapat terlepas dari keberadaan potensi bencana alam dan dampak perubahan iklim yang dapat terjadi di wilayah Indonesia.

Bencana alam dan perubahan iklim dapat berdampak serius terhadap kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan, seperti kenaikan muka air laut yang dapat menyebabkan tenggelamnya pulau-pulau kecil dan sebagian wilayah/lahan budidaya di wilayah pesisir, intrusi air laut ke daratan, peningkatan dan perubahan intensitas cuaca ekstrem (badai, siklon, banjir) yang berpengaruh terhadap kegiatan penangkapan dan budidaya ikan, serta kerusakan sarana dan prasarana

Tantangan dan Hambatan:

INDUSTRI PERIKANAN DAN DAYA SAING

Permasalahan dan tantangan yang dihadapi terbagi dalam enam kelompok besar, yaitu

1. Tantangan peningkatan investasi dan pengembangan usaha
2. Tantangan logistik, efisiensi biaya logistik hasil kelautan dan perikanan serta sarana dan prasarana
3. Tantangan peningkatan ekspor ikan
4. Kekurangan gizi /ancaman stunting
5. Permasalahan peningkatan kapasitas usaha dan mutu produk olahan perikanan skala usaha mikro kecil (UMKM)
6. Permasalahan peningkatan usaha pengolahan skala menengah besar yang berkelanjutan.

1

Tantangan peningkatan investasi dan pengembangan usaha

- 1) akses pembiayaan yang terbatas, kapasitas kelembagaan yang masih rendah dan cenderung lambat, infrastruktur perikanan yang belum memadai dan tidak merata di setiap wilayah.
- 2) Kesulitan akses pembiayaan terutama terjadi pada pelaku usaha mikro kecil kelautan dan perikanan, karena belum bankable dalam skema pembiayaan dan kelayakan usaha.
- 3) Di sisi lain, perbankan dan lembaga pemberi kredit minim informasi tentang calon debitur potensial.
- 4) Beberapa pelaku usaha masih mengalami hambatan berusaha dan investasi terutama terkait perizinan, pajak, dan tumpang tindih regulasi.
- 5) Namun bagi investor besar, tantangan yang dihadapi adalah minimnya informasi peluang usaha dan investasi kelautan dan perikanan yang salah satunya karena ketersediaan profil investasi yang ready to offer serta promosi usaha dan investasi yang belum berjalan optimal

Tantangan pada tahap implementasi investasi antara lain:

- 1) Pelaku investasi kelautan dan perikanan sering terkendala tarif bea masuk barang modal (izin/pajak) yang masih tinggi,
- 2) Sementara insentif investasi yang diberikan belum berjalan optimal.
- 3) Penyederhanaan birokrasi investasi melalui perizinan online yang dikembangkan Ditjen PDSPKP dan sistem perpajakan yang lebih baik, diharapkan dapat memberi solusi

2

Tantangan logistik

Efisiensi biaya logistik hasil kelautan dan perikanan antara lain meliputi:

- 1) terkait tata kelola dan koordinasi logistik antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, dan swasta yang belum optimal, sarana dan prasarana logistik yang belum memadai,
- 2) pengelolaan kelembagaan logistik yang belum optimal.

Kondisi tersebut menyebabkan biaya logistik yang sangat tinggi di Indonesia, yaitu mencapai 27% terhadap PDB, di mana aktivitas logistik hasil kelautan dan perikanan menjadi salah satu penyumbang utamanya. Bank Dunia (2018) menyatakan kinerja logistik Indonesia berada pada ranking timeline 41 dengan skor 3,67. Kinerja tersebut jauh di bawah Singapura (ranking 6, skor 4,32) dan tiga negara ASEAN lainnya (Thailand, Vietnam, dan Malaysia)

Sarana dan prasarana logistik kelautan dan perikanan antara lain meliputi:

- 1) ketersediaan cold storage, pabrik es, dan gudang kering yang digunakan untuk penyimpanan produk kelautan dan perikanan belum merata di koridor logistik ikan,
- 2) kapasitasnya juga masih terbatas.
- 3) Sarana transportasi seperti mobil berpendingin dan mobil angkut ikan hidup jumlahnya juga sangat sedikit.
- 4) Dari sisi rantai suplai, konektivitas dan informasi logistik yang ada masih bersifat asimetris, dimana aliran informasi ketersediaan ikan dari sentra produksi ke sentra distribusi/pemasaran yang membutuhkan ikan sering tersendat, tidak lengkap, dan lambat. Hal ini perlu dipecahkan dengan mengembangkan Sistem Telusur Logistik Ikan (STELINA) yang lebih baik dan implementasinya dapat berimprovisasi dengan IoT system



3

Masalah kekurangan gizi/ ancaman stunting

Permasalahan lainnya yang masih dihadapi Indonesia adalah masih adanya masyarakat yang kekurangan gizi (undernutrition) dan kerdil (stunting). Penyelesaian permasalahan ini membutuhkan peran sektor kelautan dan perikanan, khususnya dalam menyediakan sumber pangan bergizi berbasis protein ikan dengan jumlah dan aksesibilitas yang memadai.

Ancaman stunting (gizi buruk) merupakan masalah yang erat kaitannya dengan pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Stunting timbul salah satunya karena terbatasnya aksesibilitas masyarakat terhadap ikan, terutama di wilayah pedalaman dan aksesnya jauh ke pesisir, harga ikan yang cenderung fluktuatif dipengaruhi oleh musim, dan rendahnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya ikan untuk asupan protein dan gizi. Akibatnya, sering tidak peduli dalam pemenuhan kebutuhan makan sehari-hari. Di samping itu, mutu ikan yang dijual di pasar-pasar yang jauh dari pesisir terutama yang pengelolaannya tradisional umumnya kurang baik, sehingga minat beli masyarakat turun. Beberapa wilayah juga belum menjadikan ikan sebagai sumber utama protein bagi keluarganya. Pemenuhannya diperoleh dari sumber nabati yang konsumsinya juga terbatas.

Dalam hal pengembangan usaha skala mikro kecil, kapasitas produksi dan mutu produk olahan perikanan yang dihasilkannya masih rendah, sedangkan menjadi pelaku utama dalam penyediaan produk ikan di Indonesia termasuk ke pasar-pasar pedalaman. Akibatnya banyak dari mereka yang belum memenuhi standar kelayakan pengolahan. Hingga saat ini, jumlah usaha mikro kecil kelautan dan perikanan yang telah memiliki Sertifikasi Kelayakan Pengolahan masih di bawah 1%

4

Permasalahan peningkatan kapasitas usaha dan mutu produk olahan perikanan skala usaha mikro kecil

Penyebab utama dari rendahnya kapasitas usaha dan mutu produk olahan perikanan skala usaha mikro kecil di Indonesia diantaranya pengetahuan para pelaku usaha mikro kecil tentang standar mutu yang masih rendah, penyebaran usaha yang luas dan terfragmentasi, belum melaksanakan prinsip-prinsip usaha secara profesional, serta klasterisasi usaha skala mikro kecil yang belum berjalan baik. Akibatnya, pelaku usaha mikro kecil kelautan dan perikanan sering berjalan sendiri tanpa terdeteksi dan mengembangkan usaha dan mutu produk dengan kemampuan terbatas yang dimiliki.

Permasalahan teknologi, modal, informasi dan akses pasar, serta perizinan juga banyak dihadapi pelaku usaha mikro kecil kelautan dan perikanan di hampir semua wilayah. Dalam hal pengembangan pasar, pelaku aktif sangat potensial untuk menghasilkan produk UKM kapasitas ekspor namun masih minim pembinaan.

Keterbatasan sarana dan prasarana pengolahan dan Sistem Rantai Dingin (SRD) serta minimnya pengetahuan pelaku UMKM terkait standar teknis mutu produk kelautan dan perikanan (GMP, SSOP, HACCP, traceability) menjadi tantangan tersendiri dalam pengembangan produk ekspor UMKM kelautan dan perikanan

5

Tantangan untuk ekspor hasil kelautan dan perikanan, terdapat beberapa tantangan dan permasalahan yang sedang dihadapi terkait dalam pencapaian target ekspor, yaitu:

- 1) Kapasitas pasokan produksi dan pemenuhan kualitas bahan baku untuk ekspor belum maksimal;
- 2) Belum kompetitifnya produk perikanan di pasar utama dunia (rendahnya market share);
- 3) Diversifikasi pasar dan produk ekspor belum optimal, hambatan ekspor di negara tujuan baik tarif maupun non tarif (SPS dan TBT);
- 4) Adanya hambatan registrasi dan penambahan eksportir terdaftar di negara tujuan ekspor antara lain Uni Eropa, Rusia, RRT, Arab Saudi, dan Brazil;
- 5) Rendahnya utilitas UPI untuk tujuan ekspor

6

Permasalahan peningkatan usaha pengolahan skala menengah besar yang berkelanjutan.

Usaha pengolahan skala menengah besar juga memiliki permasalahan yang tidak kalah kompleks. Dalam hal peningkatan kapasitas usaha, pelaku usaha pengolahan skala menengah besar masih dihadapkan dengan permasalahan utilitas rendah, kompetisi pemenuhan bahan baku, fasilitas infrastruktur penunjang produksi yang terintegrasi, dan revitalisasi Sistem Rantai Dingin (SRD) yang belum optimal. Akibatnya sering kesulitan dalam memenuhi permintaan pasar berskala besar, terutama yang sifatnya kontinyu. Persaingan bahan baku meningkat pada musim paceklik, sementara di saat banyak ikan tidak bisa menyetok karena tidak memiliki infrastruktur rantai dingin. Hal ini terus berulang setiap tahunnya, dan beberapa yang tidak kuat bersaing terpaksa menutup usahanya.

terfasilitasi penerbitan standar teknis mutu (GMP, SSOP, HACCP, Traceability), dan belum memiliki sertifikat lingkungan. Permasalahan ini menjadi penghambat beberapa usaha pengolahan skala menengah besar dalam memanfaatkan peluang ekspor produk kelautan dan perikanan. Hal tersebut perlu dijadikan fokus dalam upaya penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan ke depan, sehingga mendukung peningkatan ekspor dan konsumsi ikan dalam negeri. Introduksi konsep-konsep Revolusi Industri 4.0 seperti digitalisasi usaha, perizinan online, lelang online, dan block chain dalam penelusuran bahan baku/logistik ikan perlu dilakukan. Perizinan online perlu terus disempurnakan dalam rangka fasilitasi kemudahan berusaha.

Klaster 4

Industri manufaktur perkapalan dan bahan baku perkapalan.

Tantangan dan Hambatan:

1. jaminan kualitas produk dan bahan baku yang rendah;
2. produktivitas yang rendah;
3. kurangnya penguasaan, penerapan, dan transfer teknologi;
4. infrastruktur yang tidak memadai;
5. terbatasnya investasi;
6. lemahnya rantai pasok;
7. pencemaran dan degradasi ekosistem;
8. kurangnya sinergi kebijakan dan program antar kementerian/lembaga, serta antara pemerintah pusat dan daerah; dan
9. cepatnya perubahan pasar dan teknologi

Sektor ini dapat mencakup pengolahan komoditas laut, industri galangan kapal, industri kimia dan farmasi berbasis kelautan (termasuk garam), konstruksi kelautan, dan jasa manufaktur berbasis kelautan; yang banyak di antaranya memainkan peran penting dalam mendukung pengembangan dan perluasan sektor ekonomi biru lainnya termasuk energi terbarukan kelautan, perikanan, dan akuakultur

Tantangan industri garam

Terkait dengan permasalahan garam, selama ini kebutuhan nasional garam dalam negeri banyak dipenuhi dari impor. Sebagai negara yang memiliki panjang pantai nomor dua di dunia, sudah seharusnya kebutuhan nasional garam dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri. Saat ini produksi garam nasional masih belum dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri baik secara kuantitas maupun kualitas, yang antara lain dikarenakan usaha pergaraman masih tradisional, infrastruktur yang minim, dan tata niaga garam yang belum mendukung.

Berdasarkan permasalahan dan tantangan tersebut, pengembangan industri manufaktur berbasis kelautan di Indonesia perlu difokuskan pada peningkatan produktivitas, nilai tambah, daya saing, dan keberlanjutan melalui

1. Perluasan pendidikan dan pelatihan yang relevan;
2. Peningkatan penerapan teknologi dan inovasi untuk produktivitas dan diversifikasi;
3. Peningkatan jaminan kualitas produk;
4. Penguatan rantai pasok yang didukung oleh peningkatan infrastruktur dan investasi maritim;

5. Memperluas ekonomi sirkuler, serta konsumsi dan produksi yang berkelanjutan untuk mengurangi kerusakan lingkungan dan menciptakan nilai tambah, termasuk dari sampah laut;
6. Memperluas pasar;
7. Mendorong skema dan insentif keuangan yang kreatif untuk mendukung proyek-proyek manufaktur berbasis kelautan yang berfokus pada keberlanjutan; dan
8. Meningkatkan kebijakan yang baik serta sinergi dalam implementasi kebijakan dan program yang melibatkan kolaborasi publik dan swasta
9. Mengembangkan pangan biru, penyedia pangan di hulu dan di tengah rantai pasok

Klaster 5

Sistem Logistik, Transportasi Dan Perdagangan Jalur Perairan

Tantangan dan Hambatan:

1. Kesenjangan infrastruktur maritim;
2. Biaya logistik yang tinggi;
3. Ketergantungan terhadap bahan bakar fosil untuk transportasi laut;
4. Risiko keamanan di laut;
5. Kurang optimalnya kerja sama pemanfaatan Alur Laut Kepulauan Indonesia /ALKI

Pengembangan perdagangan, transportasi, dan logistik maritim dalam ekonomi biru Indonesia diarahkan untuk

1. Meningkatkan penyediaan, kualitas, dan integrasi infrastruktur maritim;
2. Mengembangkan Indonesia sebagai hub global melalui penguatan jalur pelayaran serta pelabuhan dan manajemen logistik;
3. Meningkatkan perdagangan antarpulau dan rantai pasok;
4. Mendorong penghijauan transportasi, pelayaran, pelabuhan, dan layanan logistik;
5. Memperluas pembiayaan maritim;
6. Meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum di laut; dan
7. Memperkuat instrumen hukum dan upaya diplomasi dalam merespon dinamika geopolitik perbatasan perairan melalui kerangka kerja sama bilateral, regional, dan global dalam pemanfaatan ALKI



Klaster 6

Destinasi pariwisata berbasis bahari dan danau serta pemanfaatan jasa kelautan berkelanjutan

Tantangan dan Hambatan:

1. Peningkatan polusi di destinasi wisata yang mengubah keanekaragaman vegetasi dan ekosistem, serta menurunkan kualitas pengalaman wisata
2. fasilitas dan aksesibilitas yang terbatas
3. penurunan daya dukung destinasi
4. investasi yang terbatas
5. keterbatasan kapasitas masyarakat lokal, organisasi pengelola destinasi, industri, dan pemerintah dalam manajemen pariwisata berkelanjutan; dan
6. keterbatasan pasokan sumber daya manusia yang berkualitas.

Arah pengembangan sektor pariwisata berkelanjutan dalam ekonomi biru Indonesia meliputi

1. Menetapkan zonasi kawasan untuk kegiatan pariwisata;
2. Meningkatkan keterampilan pariwisata;
3. Memperkuat pengelolaan destinasi pariwisata yang berkelanjutan;
4. Memperluas penerapan standar industri pariwisata
5. Meningkatkan fasilitas dan transportasi yang berkelanjutan di destinasi pariwisata;
6. Meningkatkan investasi pariwisata berkelanjutan;
7. Mengembangkan pariwisata bahari berbasis masyarakat yang berkelanjutan yang didukung oleh akses masyarakat terhadap wilayah pesisir; dan
8. Memperkuat keberlanjutan dan ketahanan rantai pasok pariwisata, termasuk untuk melibatkan masyarakat lokal, masyarakat adat dan industri pariwisata lokal, serta meningkatkan manfaat dari penerapan ekonomi sirkuler dalam rantai pasok pariwisata

Klaster 7

Destinasi pariwisata berbasis bahari dan danau serta pemanfaatan jasa kelautan berkelanjutan

Tantangan dan Hambatan:

PEMANFAATAN JASA KELAUTAN BERKELANJUTAN

1. Tingginya tingkat keanekaragaman hayati yang hilang akibat perubahan iklim dan praktik-praktik yang tidak berkelanjutan
2. Kurangnya data dan analisis mengenai status dan tren ekosistem pesisir dan laut, termasuk dampak dan ketergantungan sektor-sektor ekonomi biru terhadap ekosistem pesisir dan laut
3. Kurangnya pendanaan dan sumber daya, ditambah dengan kesenjangan dalam hal kebijakan dan tata kelola yang terintegrasi (pemerintah pusat dan daerah) dan mekanisme pendanaan.

Konservasi laut dan pengelolaan berkelanjutan dari pengembangan jasa ekosistem melingkupi lintas sektor dan akan lebih ditingkatkan dengan

- Meningkatkan penegakan dan efektivitas KKP dan pemanfaatannya
- Memperkuat pengelolaan bersama dan berpartisipasi dalam pendekatan kemitraan multi-pemangku kepentingan dalam pelaksanaan KKP dan pengembangan karbon biru;
- Memperkuat koordinasi antar kementerian dan pemerintah daerah terkait konservasi dan pengembangan karbon biru;
- Meningkatkan penanaman dan rehabilitasi hutan bakau, lamun, dan terumbu karang;
- Mengembangkan dan mengimplementasikan secara efektif kerangka kerja kebijakan terpadu terkait konservasi laut dan pengembangan karbon biru;
- Mengembangkan mekanisme keuangan dan pendanaan yang inovatif untuk mendukung transisi menuju ekonomi biru yang berkelanjutan dan pendekatan berbasis pasar karbon biru;
- Mendorong penelitian dan pengembangan serta peningkatan kapasitas dalam pengelolaan KKP dan pengembangan karbon biru; dan
- Merancang rencana tata ruang laut dan pesisir yang efektif yang mendorong keselarasan antara mekanisme perlindungan lingkungan laut dan pesisir dengan aktivitas manusia

Tantangan dan Hambatan:

Sektor biru Indonesia menyimpan potensi luar biasa untuk menjadi lokomotif ekonomi nasional. Dalam perjalanannya menuju implementasi ekonomi biru, sektor ini tidak luput dari tantangan dan hambatan. Dalam sebuah diskusi terarah (FGD) dengan pemangku kepentingan dalam lingkup pemerintahan dan otoritas Lembaga keuangan, terungkap tantangan yang disuarakan seperti terkait prioritas anggaran negara yang masih terfokus pada sektor lain, perubahan kelembagaan riset, dan minimnya mitra K/L, terutama di sektor keuangan. Hal ini memberikan efek domino pada kurangnya informasi dan dorongan internal dari pimpinan tertinggi. Masih terdapat pihak yang menilai bahwa biaya sektor biru belum dianggap menjadi prioritas pembangunan negara. Hal ini tercermin dari biaya investasi yang tinggi, belum banyaknya lembaga keuangan komersial, minimnya ahli dan sumber daya, serta rendahnya prioritas daerah untuk sektor biru, bagaikan rintangan yang menghadang laju kemajuan.

Beragam tantangan internal menjadi hambatan yang signifikan dalam mewujudkan implementasi proyek biru di Indonesia. Kelemahan tata kelola kelembagaan dan sisi bisnis yang belum matang, serta kualitas tata kelola koperasi atau BUMD/BUMDes masih perlu dibenahi. Dari sisi biaya, ditemukan bahwa alokasi anggaran untuk implementasi proyek biru masih terbatas. Belum ada anggaran untuk pembebasan lahan. Kurangnya sosialisasi pendanaan proyek biru juga menjadi hambatan finansial yang perlu segera diatasi. Selain itu, koordinasi antar K/L yang masih terkesan semrawut, serta perlunya forum kerjasama khusus dan dukungan regulasi yang kuat, menjadi kunci untuk menyelaraskan langkah dan memaksimalkan potensi sektor biru.

Kompleksitas regulasi yang dinamis dan harmonisasi peraturan yang belum optimal. Penegakan hukum yang lemah dan praktik korupsi yang masih membayangi juga menjadi penghambat terbesar bagi terlaksananya proyek-proyek strategis. Rendahnya tingkat pendidikan dan akses informasi masyarakat pesisir menjadi pemisah antara mereka dengan peluang di sektor biru. Dari segi lingkungan, perubahan iklim dan konflik maritim masih mengancam stabilitas dan keamanan kawasan. Tantangan lain seperti tuntutan ganti rugi lahan, lokasi sumber energi terbarukan yang terpencil, dan tingginya demand di pulau-pulau utama, juga masih menjadi tantangan dalam pengembangan ekonomi biru di Indonesia.

Penyerapan Tenaga Kerja Sektor KP dalam Dunia Usaha dan Dunia Industri

Sektor Kelautan dan Perikanan (KP) di Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi sumber lapangan pekerjaan yang menjanjikan. Namun, ironisnya, masih banyak tenaga kerja terampil di bidang ini yang belum terserap oleh Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI). Hal ini disebabkan oleh berbagai hambatan, mulai dari masalah keterampilan dan kapasitas, infrastruktur dan akses pasar, kebijakan dan regulasi, kesadaran dan minat kerja, hingga aspek pendidikan. Uraian tantangan/hambatan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Pertama, keterampilan dan kapasitas tenaga kerja KP masih belum memenuhi standar DUDI. Kurangnya keahlian di bidang teknik penangkapan ikan berkelanjutan, pengolahan hasil laut, navigasi, dan lain-lain menjadi jurang pemisah antara kompetensi dan kebutuhan industri. Ditambah lagi, rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki sebagian besar pekerja KP, membuat mereka kesulitan mengikuti pelatihan dan beradaptasi dengan teknologi baru.

Kedua, infrastruktur dan akses pasar yang tidak memadai menjadi batu sandungan bagi kelancaran distribusi hasil laut. Kurangnya pelabuhan, gudang penyimpanan, dan akses jalan yang layak di daerah pesisir membuat biaya logistik melonjak tinggi, sehingga menekan harga jual hasil panen dan merugikan para nelayan dan pembudidaya ikan. Akses pasar yang terbatas, terutama bagi mereka yang berada di daerah terpencil, semakin memperparah situasi ini.

Ketiga, kebijakan dan regulasi yang tidak berpihak pada nelayan kecil dan pembudidaya ikan turut memperlambat kemajuan sektor KP. Penegakan hukum yang lemah terhadap penangkapan ikan ilegal, unreported, and unregulated (IUU) membuat nelayan kecil dirugikan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Diskriminasi gender dalam hal akses kerja dan pelatihan juga menjadi momok yang menghambat kemajuan perempuan di sektor ini.

Keempat, kurangnya kesadaran akan keselamatan kerja dan stigma negatif terhadap sektor KP turut menyurutkan minat generasi muda untuk terjun ke dunia ini. Anggapan bahwa sektor KP memiliki risiko tinggi, rawan ketidakpastian, dan kurang menarik menjadi penghalang bagi mereka untuk memilih KP sebagai karir masa depan.

Kelima, kurikulum pendidikan yang belum selaras dengan kebutuhan DUDI juga menjadi faktor pendorong mismatch antara skillset dan kebutuhan industri. Beasiswa dan pelatihan yang terbatas, terutama untuk sertifikasi kompetensi, semakin memperparah situasi ini. Kurangnya sinergi antar lembaga terkait dan program-program antar K/L yang belum selaras juga menjadi hambatan yang perlu segera dibenahi.

Dengan demikian, untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan solusi komprehensif yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, swasta, hingga masyarakat, dengan fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, perbaikan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, dan perubahan persepsi masyarakat terhadap sektor

Usulan Rekomendasi Pengelolaan ekosistem, kawasan konservasi perairan dan pesisir:

1 Perencanaan dan Penganggaran Kawasan Konservasi di Daerah

Daerah perlu meningkatkan kemampuan dalam perencanaan dan penganggaran kawasan konservasi. Penting bagi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk memberikan panduan detail melalui Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang akan membantu daerah dalam menyusun dan mengimplementasikan rencana tersebut secara efektif (dengan bantuan koordinasi via Kemendagri).

2 Pemahaman Potensi Sumber Dana Kawasan Konservasi

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) perlu mendukung daerah dalam meningkatkan pemahaman mengenai potensi sumber dana untuk kawasan konservasi, termasuk pelatihan dan penyediaan informasi yang relevan untuk mengakses sumber-sumber dana tersebut.

3 Pendanaan Global melalui Hibah

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) diharapkan membantu daerah dalam penyusunan proposal atau concept note yang kuat untuk mengakses sumber pendanaan global seperti Green Climate Fund (GCF) dan Global Environment Facility (GEF), yang penting untuk mendukung proyek-proyek konservasi.

4 Potensi Instrumen Pendanaan Lain

Bappenas bersama dengan Kemenkeu perlu menjajaki kemungkinan memanfaatkan mekanisme atau instrumen pendanaan lain seperti Result Based Payment (RBP) dan mengevaluasi peluang pendanaan melalui alur fiskal daerah. Pemanfaatan potensi ini akan membantu mengoptimalkan sumber pendanaan untuk kawasan konservasi.

5 Eksplorasi Peluang Pendanaan dalam RPJMN

Bappenas dan Kemenkeu harus bekerja sama untuk mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang pendanaan yang belum dieksplorasi dan dapat dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kawasan konservasi mendapatkan pendanaan yang cukup.

6 Diskusi Mendatang tentang Dana Perimbangan

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan diharapkan untuk menghadiri pertemuan mendatang dan mendiskusikan tentang penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) lebih lanjut. Diskusi ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman tentang bagaimana dana-dana tersebut bisa lebih efektif dimanfaatkan untuk mendukung kawasan konservasi.

Usulan Rekomendasi Tata Kelola Ekonomi Biru:

Rekomendasi tata kelola dan kelembagaan serta peningkatan SDM maritim dirangkum dalam lima poin utama, yakni: (1) penguatan kerangka hukum dan regulasi, (2) pengembangan instrumen pendanaan, (3) peningkatan kapasitas dan sumber daya manusia, (4) kolaborasi multi-stakeholder, dan (5) fokus pada kelestarian lingkungan, yang diuraikan sebagai berikut.

1 Penguatan kerangka hukum dan regulasi.



Dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi biru yang berkelanjutan, perlu adanya fondasi hukum yang kuat dan jelas. Pemerintah perlu menyusun regulasi yang tidak hanya menarik

investor dengan memberikan perlindungan hukum yang memadai, kemudahan berusaha, dan kerangka hukum yang transparan, tetapi juga memperkuat penegakan hukum lingkungan untuk menjaga kelestarian ekosistem laut. Selain itu, perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual sangat penting untuk mendorong inovasi dan pengembangan teknologi baru di sektor kelautan. Agar regulasi ini efektif, sosialisasi kepada masyarakat pesisir secara intensif menjadi kunci agar mereka memahami dan turut berperan dalam menjaga kelestarian laut. Dengan demikian, tercipta iklim investasi yang kondusif dan masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam pengelolaan sumber daya laut.

2 Pengembangan instrumen pendanaan.



Dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi biru yang berkelanjutan, perlu adanya fondasi hukum yang kuat dan jelas. Pemerintah perlu menyusun regulasi yang tidak hanya menarik

investor dengan memberikan perlindungan hukum yang memadai, kemudahan berusaha, dan kerangka hukum yang transparan, tetapi juga memperkuat penegakan hukum lingkungan untuk menjaga kelestarian ekosistem laut. Selain itu, perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual sangat penting untuk mendorong inovasi dan pengembangan teknologi baru di sektor kelautan. Agar regulasi ini efektif, sosialisasi kepada masyarakat pesisir secara intensif menjadi kunci agar mereka memahami dan turut berperan dalam menjaga kelestarian laut. Dengan demikian, tercipta iklim investasi yang kondusif dan masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam pengelolaan sumber daya laut.

3 Peningkatan kapasitas sumber daya manusia.



Sinergi antara pendidikan dan inovasi akan mendorong pertumbuhan sektor kelautan. Melalui program pelatihan dan sertifikasi, masyarakat

pesisir dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk bekerja di sektor kelautan. Sementara itu, investasi dalam riset dan inovasi akan menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan nilai tambah produk perikanan. Dengan demikian, sektor kelautan dapat menjadi motor penggerak perekonomian nasional.

3 kolaborasi multi-stakeholder.



Sektor swasta memiliki peran yang strategis dalam pengembangan pendanaan biru untuk mendukung ekonomi biru. Kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta dalam

proyek-proyek inovatif akan mendorong terciptanya solusi-solusi baru untuk mengatasi tantangan di sektor kelautan. Selain itu, sektor swasta juga dapat berperan dalam memberikan pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat pesisir, sehingga mereka dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Pemerintah perlu menciptakan iklim investasi yang kondusif dan memberikan insentif bagi sektor swasta untuk berinvestasi di sektor kelautan.

5 Fokus pada kelestarian lingkungan



Pendekatan holistik diperlukan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Reboisasi hutan mangrove akan melindungi pantai dari abrasi dan menyediakan habitat bagi berbagai jenis biota

laut. Program ketahanan pangan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Penerapan prinsip ESG (Environmental, Social and Governance) akan memastikan bahwa kegiatan ekonomi memberikan dampak positif bagi lingkungan dan sosial. Valuasi jasa lingkungan akan memberikan dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan yang berkelanjutan.

6 Kebijakan pendanaan biru diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.



Dengan menciptakan lapangan kerja baru di sektor kelautan, mengurangi kemiskinan, dan melestarikan lingkungan, kebijakan ini diharapkan dapat memperbaiki kualitas hidup masyarakat pesisir.

Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan upaya untuk menarik investasi, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, mendorong inovasi, dan memperkuat kolaborasi multi-stakeholder. Melalui kebijakan pendanaan biru yang tepat dan komprehensif, diharapkan dapat tercipta pertumbuhan ekonomi biru yang inklusif dan berkelanjutan

Usulan Rekomendasi Pendanaan Ekonomi Biru:

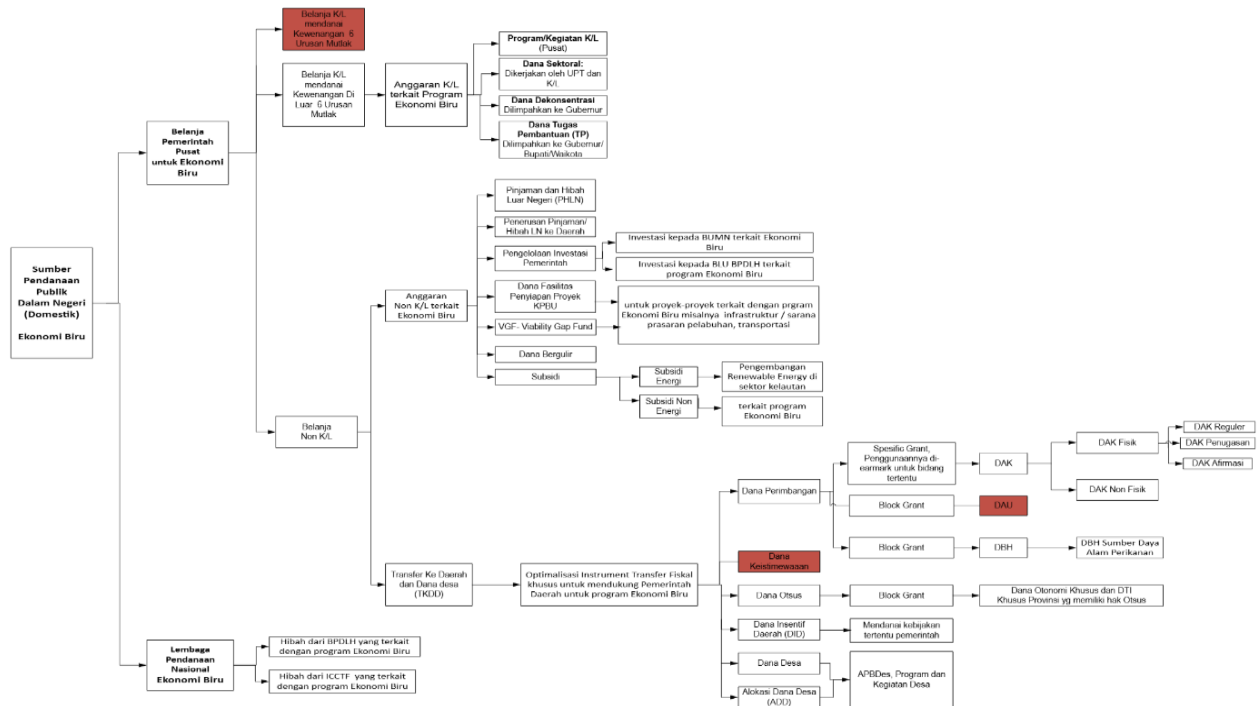
Dalam menghadapi berbagai tantangan dan hambatan keempat klaster (Industrialisasi berbasis SDA perikanan dan kelautan, Industri manufaktur perkapalan dan bahan baku perkapalan, Sistem logistik, transportasi dan perdagangan jalur perairan, Destinasi pariwisata berbasis bahari dan danau serta pemanfaatan jasa kelautan berkelanjutan) serta klaster satu, dua dan enam menggunakan dana APBN untuk membiayai aktivitas – aktivitas ekonomi biru.

Skema pendanaan selain APBN perlu dikembangkan untuk optimalisasi kegiatan-kegiatan di Ekonomi Biru. Secara keseluruhan usulan rekomendasi pendanaan ekonomi biru untuk 7 klaster program Ekonomi Biru sebagai berikut:

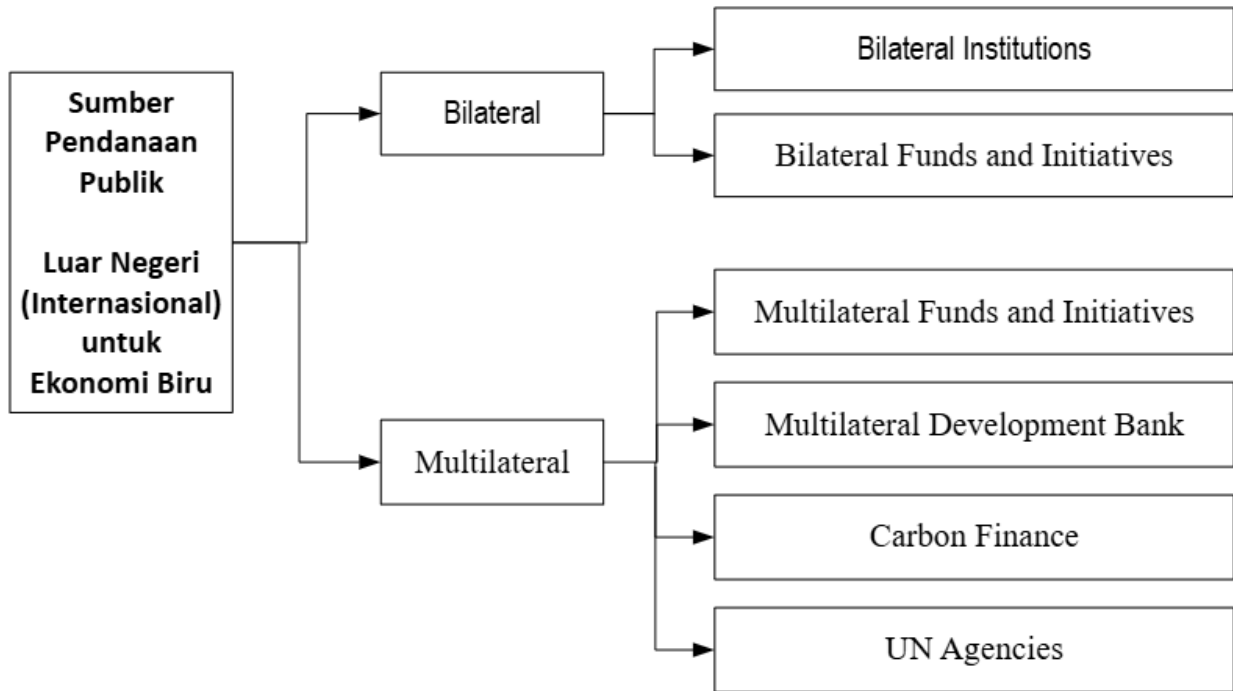
1 Mengoptimalkan sumber-sumber pendanaan publik, baik sumber pendanaan domestik dan internasional

Saat ini peta sumber-sumber pendanaan publik yang dapat dimanfaatkan oleh pendanaan biru

Sumber pendanaan publik Kategori: Nasional/ Domestik



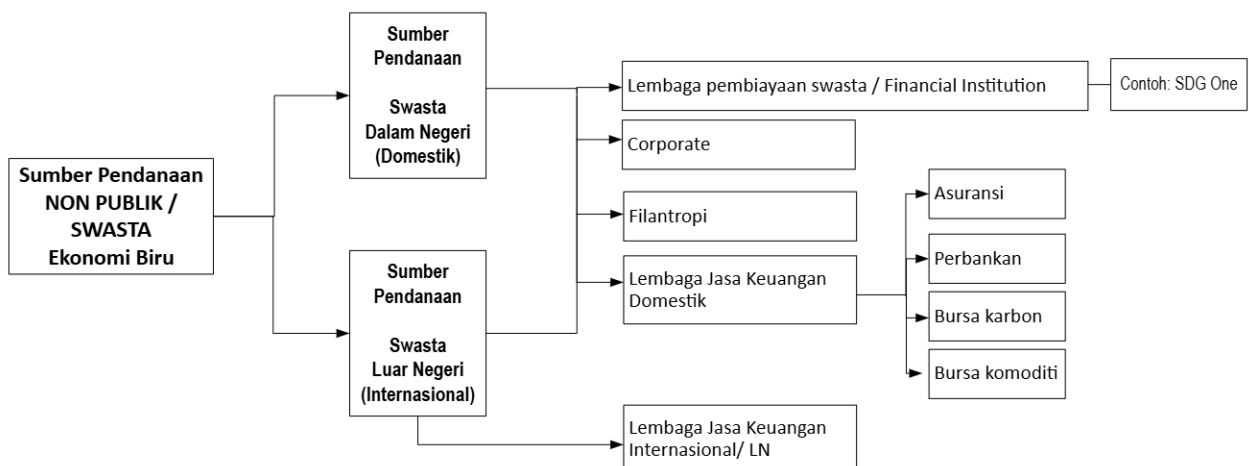
Sumber pendanaan publik
Kategori Internasional / Luar Negeri



2 Mengoptimalkan sumber-sumber pendanaan Non publik, baik sumber pendanaan domestik dan internasional

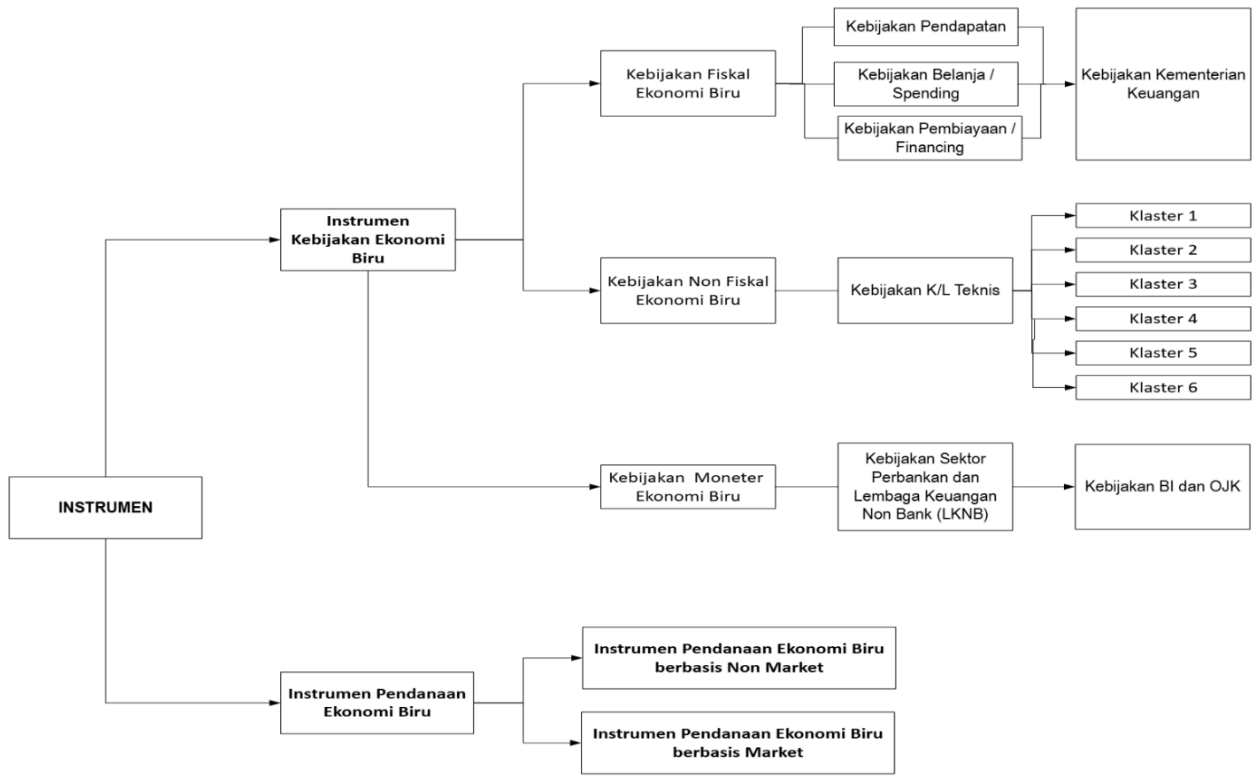
Saat ini peta sumber-sumber pendanaan publik yang dapat dimanfaatkan oleh pendanaan biru

Sumber Pendanaan Non Publik
Kategori Domestik dan Internasional



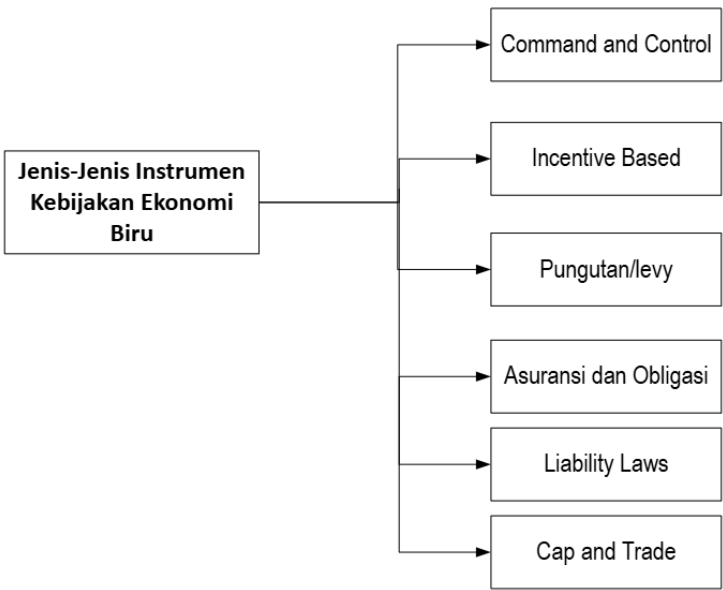
3 Diperlukan bauran instrumen kebijakan dan instrumen pendanaan untuk program ekonomi biru

Bauran Instrumen Kebijakan dan Instrumen Pendanaan untuk Ekonomi Biru

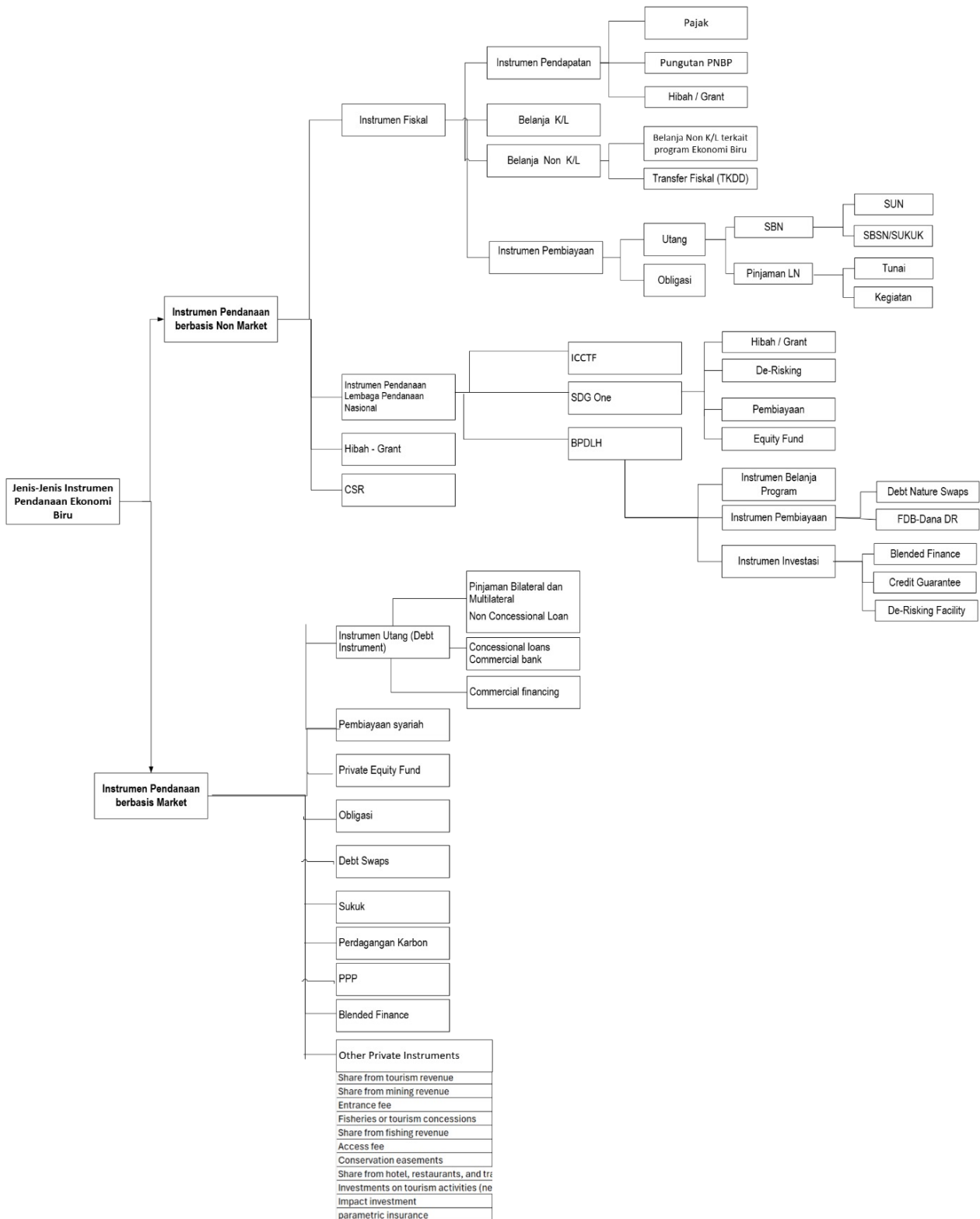


Jenis – Jenis Instrumen yang akan digunakan dalam Ekonomi Biru

Jenis Instrumen Kebijakan Ekonomi Biru



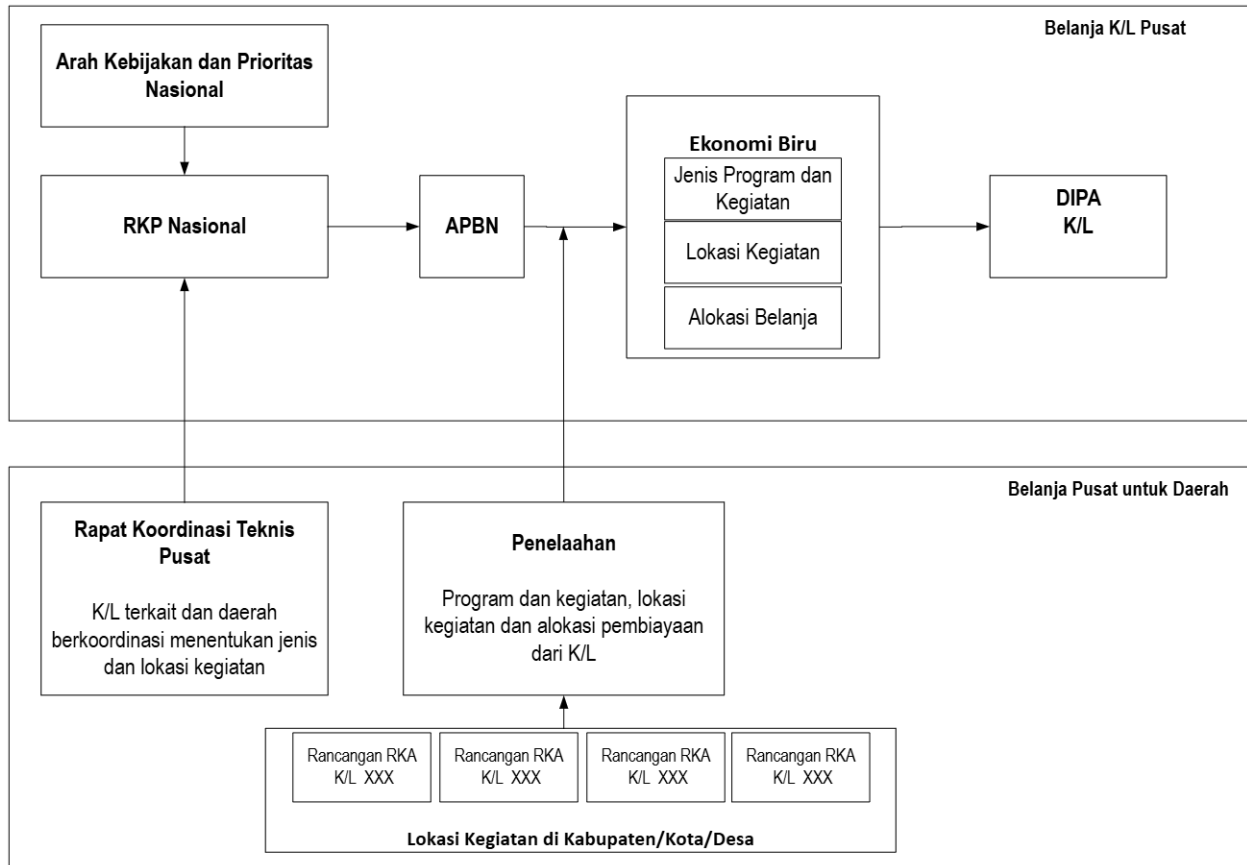
Jenis Instrumen Pendanaan Ekonomi Biru



Contoh arsitektur bauran instrumen pendanaan biru pada dirjen PRL KKP (lihat file terpisah)

- 4 Diperlukan proses perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Desa (Belanja K/L Pusat dan Belanja Pusat untuk Daerah terkait Program Ekonomi Biru dan Belanja Daerah Provinsi/Kabupaten/ Kota terkait Program Kegiatan Ekonomi Biru)

Belanja K/L Pusat dan Belanja Pusat untuk Daerah terkait Program Ekonomi Biru



Arsitektur Pendanaan Biru untuk Program Ekonomi Biru Astacita – Pengelolaan Ruang Laut

Kementerian Kelautan dan Perikanan - Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

PIC	Klaster 1 Tata kelola	Klaster 2 Konservasi	Klaster 3 Fishery Aquaculture, UMKM	Klaster 4 Kapal, Garam, Pasir	Klaster 5 Port Logistics Transport	Klaster 6 Tourism Jasa Kelautan	Klaster 7 Iptek R&D Biotek, EBT, SDM
Dit. Perencanaan Ruang Laut	v	v		v		v	v
Dit. Pendayaan Pesisir dan Pulau-pulau kecil	v	v		v		v	v
Dit. Jasa Kelautan	v	v				v	v
Dit. Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut	v	v					v
Overall	v	v		v		v	v

	INSTRUMEN PENDANAAN BIRU	KLASTER 1	KLASTER 2	KLASTER 3	KLASTER 4	KLASTER 5	KLASTER 6	KLASTER 7
Pinjaman (Loan) Development Partner	Loan bilateral – Non Concessional		●					
	Loan bilateral – Concessional		●	●				
	Loan multilateral – Non Concessional		●					
	Loan multilateral – Concessional		●	●				

	INSTRUMEN PENDANAAN BIRU	KLASTER 1	KLASTER 2	KLASTER 3	KLASTER 4	KLASTER 5	KLASTER 6	KLASTER 7
Pinjaman Private sector	Commercial bank/ Banking sector		 					
	Commercial Financing							
	Loan from SOE (BUMN)							
Capital Market	Blue Bond / Obligasi biru dari sektor swasta		 marine		 Sand Salt			
	Blue Carbon Project → Blue Carbon Credit, Mangrove planting		 marine				 coastal small island	
	Blue Carbon Project → Blue Carbon Credit, Mangrove Restoration Project		 marine				 coastal small island	
	Carbon Trading ETS, unit carbon Decarbonizing the Maritime Industry					 marine		
	Debt for Nature Swaps		 marine				 coastal	
	Private Equity Fund		 marine	 marine EBT	 Sand Salt		 coastal Small island	
	Blue Equity Fund		 marine		 Sand Salt			
	Venture Capital		 marine	 marine EBT	 Sand Salt		 coastal Small island	
Impact	Environmental Impact Bonds		 marine				 coastal Small island	
	Impact Investment		 marine	 marine EBT			 coastal Small island	
Utang (Debt)	SDGs Bond				 Sand Salt			

	INSTRUMEN PENDANAAN BIRU	KLASTER 1	KLASTER 2	KLASTER 3	KLASTER 4	KLASTER 5	KLASTER 6	KLASTER 7
Other Private : terkait izin pengelolaan ruang laut: 1) produksi garam; 2) Wisata Bahari; 3) pemanfaatan air laut selain energi; 4) perusahaan pariwisata alam perairan di Kawasan Konservasi; 5) Pengangkatan Benda Muatan Kapal Tenggelam; 6) biofarmakologi laut; dan 7) bioteknologi laut,	Share from tourism revenue						● coastal Small island jaskel	
	Share from mining revenue			● marine EBT	● Sand Salt			
	Share from fishing revenue		● marine					
	Share from hotel, restaurants, transport						● coastal Small island	
	Access fee		● marine	angkat muatan kapal tenggelam			● coastal Small island Jaskel	
	Entrance fee		● marine		● biotekno laut biofarmakolgi		● coastal Small island	● biotekno laut biofarmakolgi
	Fisheries concessions		● marine					
	Tourism concessions						● coastal Small island jaskel	
	Conservation easements		● marine					
Non Banking Sectors	Insurance (Parametric Coral Reefs and Mangrove)		● marine					
	Fin-Tech			● fishery aquaculture			● coastal Small island	

	INSTRUMEN PENDANAAN BIRU	KLASTER 1	KLASTER 2	KLASTER 3	KLASTER 4	KLASTER 5	KLASTER 6	KLASTER 7
Pembiayaan syariah	Blue Sukuk		● marine				● marine	
	Dana Zakat		● marine					
	Dana Wakaf							
Instrumen Fiskal - Pendapatan	Pendapatan – Pajak			● fishery aquaculture	● Shipping Salt sand	● Industry transport	● Tourism	
	Pendapatan – PNPB			● fishery aquaculture	● Shipping Salt sand	● Industry transport	● Tourism	
	Denda dan Pinalti			● fishery aquaculture	● Shipping Salt sand	● Industry transport Port Logistic	● Tourism	
	Pendapatan - Hibah		● marine				● coastal Small island jaskel	
Instrumen Fiskal – Belanja K/L	Belanja K/L: Program /Kegiatan KL		● marine					
	Belanja K/L: Dana Sektoral		● marine					
	Belanja K/L: Dana Dekonsentrasi		● marine					
	Belanja K/L: Dana Tugas Pembantuan (TP)		● marine					

	INSTRUMEN PENDANAAN BIRU	KLASTER 1	KLASTER 2	KLASTER 3	KLASTER 4	KLASTER 5	KLASTER 6	KLASTER 7
Instrumen Fiskal – Belanja Non K/L	Belanja Non K/L terkait ekonomi biru : Subsidi Energi dan Non Energi: Subsidi bunga kredit UMKM, Subsidi benih/bibit ikan			●		● PSO transport angkutan laut		●
	Belanja Non K/L terkait ekonomi biru : Pengelolaan Investasi Pemerintah			●	●	● Industry transport Port Logistic		●
	Belanja Non K/L terkait ekonomi biru: Dana Fasilitas Penyiapan Proyek KPBU				●	● Industry transport Port Logistic		●
	Belanja Non K/L terkait ekonomi biru: Viability Gap Fund (VGF)				●	● Industry transport Port Logistic		●
	Belanja Non K/L terkait ekonomi biru: Dana Bergulir			●				
	Belanja Non K/L – TKDD	●	●	●	●	●	●	●
	Instrumen Fiskal - Belanja	Pembiayaan Utang: SUN SBSN/ Sukuk Bond Pinjaman LN Penerusan Pinjaman ke Daerah			●	●	●	

	INSTRUMEN PENDANAAN BIRU	KLASTER 1	KLASTER 2	KLASTER 3	KLASTER 4	KLASTER 5	KLASTER 6	KLASTER 7
Instrumen Pendanaan Lembaga Pendanaan Nasional	BPD LH: Instrumen Belanja Program		●				●	
	BPD LH: Instrumen Pembiayaan, DNS		●				●	
	BPD LH: Instrumen Investasi, Blended Finance, Credit guarantee, de-risking facility		●					
	SDG One: Instrumen Pembiayaan		●					
	SDG One: Instrumen De-risking		●				●	●
	SDG One: Instrumen Equity Fund		●					
	SDG One: Hibah		●				●	●
	ICCTF: Hibah	●	●	●				
CSR	Hibah		●					
Philanthropy	Hibah		●					
Crowd funding	Hibah		●					
Payment for Ecosystem Services (PES)			●					
Blue Sovereign Wealth Fund (Blue SWF)			● marine	● fishery aquaculture	● sand salt marine EBT biofarmakologi		● coastal small island PES	● bioteknologi biofarmakologi

Keterangan Warna

	Instrumen sudah teruji		Sering digunakan / dapat digunakan di Indonesia
	Instrumen sudah teruji		Sedang diujicoba di Indonesia
	Instrumen sudah teruji		Belum dimanfaatkan untuk digunakan
	Instrumen sudah teruji di LN		Potensi untuk bisa digunakan
	Instrumen belum teruji di Indonesia/ Instrumen sudah teruji		Belum digunakan/ Tidak diprioritaskan untuk digunakan
	Instrumen sudah teruji		Penggunaan instrument terbatas/dibatasi

Keterangan eligibility pendanaan tiap klaster:

Klaster = Kegiatan Prioritas (KP)

Klaster 1

Tata Kelola
Ekonomi Biru.

A. Tata kelola klaster 2

Klaster 2

Pengelolaan ekosistem,
kawasan konservasi
perairan dan pesisir

- A. Konservasi laut
- B. Restorasi ekosistem dan kawasan konservasi
- C. Mangrove planting
- D. Coral project
- E. Sea grass
- F. Pengelolaan kawasan konservasi
- G. Pengelolaan pesisir
- H. Rehabilitasi ekosistem pesisir
- I. Ocean friendly product
- J. Water friendly product
- K. Pengelolaan sampah laut

Klaster 3

Industrialisasi berbasis SDA
perikanan dan kelautan yg
modern terintegrasi dan
berkelanjutan

- A. Industri Perikanan tangkap
- B. Industri Perikanan budidaya
- C. Industri budidaya non perikanan
- D. Seafood value chain
- E. Sarana dan prasaran perikanan tangkap
- F. Sarana dan Prasarana budidaya
- G. Teknologi dan industri pakan dan bibit
- H. Pemanfaatan EBT
- I. Fasilitas kultur jaringan
- J. Water supply and sanitation
- K. IPAL komunal
- L. Pengelolaan sampah di sentra perikanan



Klaster 4

Industri manufaktur perkapalan dan bahan baku perkapalan

- A. Industri kapal
- B. Industri manufaktur kelautan
- C. Industri Garam
- D. Industri penambangan pasir

Klaster 5

Sistem logistik, transportasi dan perdagangan jalur perairan

- A. Pelabuhan
- B. Logistik pelabuhan
- C. Sarana dan prasarana pelabuhan perikanan
- D. Jalan

Klaster 6

Destinasi pariwisata berbasis bahari dan danau serta pemanfaatan jasa kelautan berkelanjutan

- A. Jasa pariwisata berkelanjutan
- B. Jasa pariwisata bahari
- C. Pemanfaatan jasa kelautan
- D. Sarana dan prasarana industri pariwisata

Klaster 7

Kapasitas dan optimalisasi pemanfaatan iptek dan inovasi biru serta SDM maritim

- A. Iptek dan Inovasi
- B. Sarana dan Prasarana Iptek
- C. Bioteknologi laut
- D. Biofarmakologi
- E. Riset dan Pengembangan di Kelautan Perikanan serta pesisir
- F. Riset EBT
- G. Sarana dan Prasarana Riset & Pengembangan
- H. Penguatan kapasitas SDM Maritim

POLICY RECOMMENDATION



Kementerian PPN/
Bappenas



Pendanaan Ekonomi Biru Dalam Rangka Implementasi Program Prioritas Ekonomi Biru Astacita

Dipersiapkan oleh:
Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF)

